



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BENI RUSLANDI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
3. NHK : 54911

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.293.215.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/36 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 101.775.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m²/70 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 667.590.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/40 m² di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 68.188.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2073 m²/85 m² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 168.979.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m²/140 m² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 185.235.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/38 m² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 101.448.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 185.000.000

1. MOTOR, MITSUBISHI MINIMBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 890.340.727

F. HARTA LAINNYA

Rp. 1.968.787

Sub Total

Rp. 2.425.524.514

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.425.524.514



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.